

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nazeliah Komala Sari

NPP. 32.0790

Asdaf Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Program

Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email:

32.0790@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Mohamad Zaki Taufik, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): The problem identified in this study lies in the persistent presence of street children, homeless individuals, and beggars in Balikpapan City, despite the existence of various government policies and programs such as the Mayor Regulation of Balikpapan Number 6 of 2019 concerning the Integrated Handling System for Social Welfare Problems in Children. This gap indicates a discrepancy between the established policies and their implementation in the field, as the phenomenon continues to exist in the area. Although the Social Service of Balikpapan City has carried out various programs to address these issues, there has been no in-depth study analyzing the extent of the Social Service's role in the development and rehabilitation of street children, homeless individuals, and beggars, including the obstacles faced in its implementation. Therefore, this research is necessary to determine the role of the Social Service in the development of street children, homeless individuals, and beggars in Balikpapan City, East Kalimantan Province. **Method:** This research was conducted using a descriptive qualitative method, based on the theory of Jones (1993) in Mahsun (2008), which examines roles through three indicators. **Result:** Based on the findings, it can be concluded that the development efforts conducted by the Social Service toward street children, homeless individuals, and beggars have been carried out effectively through a series of stages, including street outreach, identification and registration, as well as assessment to examine the issues, potential, family and environmental conditions, and individual needs. Subsequently, social workers provide assistance to foster interaction and communication. Further development continues at the Social Protection House through various services such as rehabilitation, advocacy, assistance and care, which encompass physical, mental, spiritual, and social guidance, health services tailored to the participants' needs, and recreational-educational services offering educational support. The effectiveness of these efforts is reflected in the decreasing number of street children, homeless individuals, and beggars year by year. **Conclusion:** The role of the Social Service of Balikpapan City in the development of street children, homeless individuals, and beggars has been implemented systematically and comprehensively through various stages and services. These include outreach, identification, registration, and assessment to understand individual conditions and needs, followed by assistance from social workers. This development process is reinforced through services at the Social Protection House, which include rehabilitation, advocacy, caregiving, health

services, and recreational-educational support. All these efforts have shown positive results, as evidenced by the declining number of street children, homeless individuals, and beggars over the years.

Keywords: *Role; Social Service; Street Children; Homeless; Beggars; Development.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Permasalahan (kesenjangan penelitian) yang muncul dari latar belakang tersebut terletak pada masih ditemuinya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan meskipun telah tersedia berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, di mana fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih terdapat di wilayah Kota Balikpapan. Meskipun Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, belum ada kajian yang secara mendalam mengulas sejauh mana peran Dinas Sosial dalam aspek pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. **Metode :** Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Jones (1993) dalam Mahsun (2008), yang mengkaji peran dalam tiga indikator. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berjalan dengan baik melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjangkauan di jalanan, identifikasi dan registrasi, hingga asesmen untuk menelaah permasalahan, potensi, kondisi keluarga dan lingkungan, serta kebutuhan individu. Selanjutnya, dilakukan pendampingan oleh Pekerja Sosial guna mengembangkan interaksi dan komunikasi. Pembinaan juga dilanjutkan di Rumah Perlindungan Sosial melalui berbagai pelayanan seperti rehabilitasi, advokasi, pendampingan dan pengasuhan yang mencakup bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta pelayanan rekreatif dan edukatif yang menyediakan layanan pendidikan. Efektivitas pembinaan ini terlihat dari berkurangnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun ke tahun. **Kesimpulan:** Peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh melalui berbagai tahapan dan layanan. Mulai dari penjangkauan, identifikasi, registrasi, hingga asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan individu, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh Pekerja Sosial. Pembinaan tersebut diperkuat melalui pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial yang mencakup aspek rehabilitasi, advokasi, pengasuhan, kesehatan, hingga rekreatif-edukatif. Seluruh upaya ini menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Peran; Dinas Sosial; Anak Jalanan; Gelandangan; Pengemis; Pembinaan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjai-gepeng) merupakan persoalan kompleks yang perlu dipahami secara sosiologis (Purwoko, 2013). Mereka hidup dalam kondisi terdesak akibat kurangnya perhatian keluarga dan lingkungan sekitar yang juga mengalami kesulitan ekonomi (Anggraini, 2022) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar, namun kenyataannya masih banyak anak yang belum terurus (Almaida et al., 2023). Oleh karena itu, pembinaan terhadap anjal-gepeng sangat diperlukan agar mereka dapat menjadi aset bangsa. Anak-anak ini memiliki potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan.

Permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya anjal-gepeng, semakin krusial karena terjadi peningkatan di berbagai daerah (Caesar & LISTANIA, 2021). Hal ini menunjukkan masih banyak warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya (Nagaring, 2021). Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Di Kota Balikpapan, angka kemiskinan meningkat pada 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 18.530 jiwa (BPS Balikpapan, 2021). Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah PMKS, termasuk anjal-gepeng. Berdasarkan pengamatan (Erida, 2024), anjal-gepeng tersebar di berbagai jalan protokol dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian bahkan dikoordinir oleh kelompok tertentu yang bersifat terorganisir dan profesional, dikenal sebagai mafia anak jalanan.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dan Perwali No. 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak. Dalam Perwali tersebut dijelaskan mekanisme penanganan melalui pemetaan, pembinaan, dan pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha ekonomi produktif. Dinas Sosial Kota Balikpapan memegang peran penting melalui program rehabilitasi sosial untuk menangani anjal-gepeng, sesuai dengan regulasi yang ada. Harapannya, program ini mampu mengurangi jumlah anjal-gepeng secara nyata dan berkelanjutan.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, perlu dilakukan kajian terhadap efektivitas peran Dinas Sosial dalam membina anjal gepeng agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak nyata dan berkelanjutan. Maka dari itu, untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan pengkajian mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami tingkat urbanisasi tinggi dan dinamika sosial yang kompleks. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, kota ini masih menghadapi permasalahan sosial, salah satunya adalah keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjai-gepeng) yang tersebar di sejumlah titik strategis seperti jalan protokol, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.

Fenomena ini mencerminkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terpenuhi hak dasar dan perlindungan sosial secara layak. Pemerintah Kota Balikpapan telah merespons permasalahan ini melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak, yang mengatur penanganan secara menyeluruh mulai dari pemetaan, pengolahan data, pembinaan, hingga pemberdayaan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keberadaan jaringan eksploitasi anjal-gepeng secara terorganisir menjadi hambatan utama. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta penguatan peran Dinas Sosial dan lembaga terkait. Upaya penanganan anjal-gepeng harus diarahkan pada sistem yang tidak hanya responsif, tetapi juga bersifat preventif, rehabilitatif, dan memberdayakan secara berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. Pertama-tama, berkenaan dengan pentingnya pendataan. Melalui jurnal berjudul "Peran Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Samarinda" oleh Syamsurya perlu dipahami bahwa upaya Dinas Sosial dalam pembinaan Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sudah banyak yang dilakukan, tetapi belum maksimal dilihat masih banyaknya pelaku anak jalanan dan pengemis yang belum terjangkau (Syamsurya, 2022). Penelitian (Wahyudi et al., 2021) yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar" menemukan bahwa aspek pembinaan pencegahan dilakukan dengan kegiatan patroli setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang atau yang disingkat dengan (TRC), aspek pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assesment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), dan aspek pembinaan rehabilitasi anak jalanan adalah kerja sama Dinas Sosial Kota makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba atau biasa di singkat dengan (YKP2N). Penelitian (N et al., 2023) yang berjudul "Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo" mengungkapkan Dinas Sosial PPPA dalam menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan Walikota Probolinggo nomor 38 tahun 2019 dengan tersedianya rumah singgah sementara (Shelter) termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para Gelandangan Pengemis (GEPENG), koordinasi bersama Satpol PP. Adapun hambatan dalam menangani masalah GEPENG yaitu terbatasnya rumah singgah sementara (Shelter) bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) sehingga daya tampung yang kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian (Rachma, 2023) "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya, Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya berupa penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, penanganan pendidikan dalam hal keterampilan, penanganan pendidikan dalam hal sikap. Kendala dalam penanggulangan anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan yaitu besarnya rasa malas untuk belajar dan pada saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Penelitian (Abdullah, 2021) berjudul "Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Samarinda" menemukan bahwa Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya dan tindakan dalam menangani Anak Jalanan. Dengan dukungan dan bantuan dari instansi lain seperti SATPOL-PP, razia dilakukan untuk menetralkan Anak Jalanan dan dikumpulkan untuk di tindak lanjuti. Faktor pendukung Dinas Sosial dalam upaya menangani Anak Jalanan adalah memadainya SDM seperti dukungan dan bantuan dari SATPOL-PP terutama ketika harus turun ke lapangan yaitu ke jalanan untuk menertibkan Anak Jalanan dan mengumpulkan mereka untuk pendataan dan pembinaan. Namun, faktor penghambat

masih lebih mendominasi seperti kurangnya kesadaran orang tua, atau malah orang tua yang menyuruh anaknya membantu secara ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat dan kondisi dari keluarga anak sendiri yang tidak mampu. Penelitian Djaafar dkk. yang berjudul Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo membahas peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo dilakukan melalui pembinaan dengan pembimbingan mental, pemberdayaan dengan memberikan pelatihan dan pembiayaan dengan memberikan modal kepada pengemis untuk menjalankan usaha. (Djaafar et al., 2022). Penelitian Salsabila dkk. yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang menemukan bahwa masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis, bahkan ada golognan yang bertambah. Sebenarnya perencanaan yang dibuat dari Dinas Sosial sudah baik, dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program. Tetapi pada realisasinya kinerja belum maksimal bahkan belum terealisasi sama sekali. Misalnya sarana dan prasarana rehabilitasi di kota Tanjung Pinang masih belum ada. (Salsabila et al., 2022). Penelitian Destiani dkk. yang berjudul Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau membahas tentang upaya penanggulangan anak pengemis oleh Dinas Sosial Kota Baubau, seperti pendataan, pembinaan, dan sosialisasi, belum berjalan optimal. Pendataan masih terbatas pada saat patroli, dan banyak anak kembali mengemis meskipun telah dibina. Sosialisasi pun belum disertai sanksi tegas, sehingga belum menimbulkan efek jera. (Destiani et al., 2023). Penelitian Puri dan Hertanti yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Surabaya menemukan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Surabaya mencakup fungsi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Eksploitasi anak terjadi karena kebiasaan yang terbentuk akibat lemahnya peran khusus dalam penanganan dan rendahnya penegakan hukum. Faktor ekonomi juga mendorong anak untuk mengamen atau mengemis karena dianggap lebih menguntungkan. Dinas Sosial menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya hukum, status domisili yang tidak jelas, keterbatasan sarana prasarana, dan kurangnya tenaga terampil (Puri & Hertati, 2024). Penelitian Tambawang dkk. yang berjudul Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya menemukan bahwa penanganan anak jalanan di Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalui tiga pendekatan: *street based* dengan pemantauan dan edukasi langsung di lapangan, *community based* dengan penyadaran peran keluarga melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta bimbingan sosial berupa pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter bagi anak-anak agar mandiri dan berperilaku positif di Masyarakat (Tambawang et al., 2023). Penelitian Nasution dan Thamrin yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan menemukan bahwa implementasi kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2014 dilakukan sudah cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis, ini berarti Sistem komputerisasi di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) baik sehingga pekerjaan pegawai menjadi efektif (Nasution & Thamrin, 2016). Penelitian Afjan dan Hayati yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang) membahas tentang Implementasi Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Malang belum optimal menurut teori Van Meter dan Van Horn. Meskipun didukung oleh ketersediaan sumber daya dan fasilitas Shelter Liponsos Camp Assessment, pelaksanaannya masih terkendala oleh mobilitas penyandang masalah sosial dan ketiadaan SOP razia dari Dinas Sosial. (Pratama Afjan & Hayati, 2023). Penelitian Sakir dkk. yang berjudul Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan membahas tentang strategi Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2008, dengan fokus pada pendataan dan pemberian arahan. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh belum tersedianya

panti rehabilitasi sebagai tempat pembinaan khusus, sehingga menyulitkan pengurangan jumlah anak jalanan secara efektif. (Sakir et al., 2023). Penelitian Agung Nurrahman yang berjudul Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi membahas tentang Studi ini menyoroti lima unsur utama peran pemerintah dalam teori peran di Indonesia, termasuk kontrak sosial-politik, musyawarah kebijakan publik, hingga implementasi kebijakan. Dalam kasus penanganan isu radikalisme, kebijakan pemerintah dinilai bertentangan dengan konstitusi, janji kampanye, dan visi kementerian terkait. Kebijakan tersebut juga disusun tanpa proses partisipatif yang memadai. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik ke depan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan ruang virtual, yang hingga kini belum difasilitasi secara optimal oleh pemerintah. (Nurrahman, 2020). Buku berjudul Pengawasan Pemerintahan karya Sururama dan Amalia (2020) mengemukakan bahwa tujuan utama dari pengawasan adalah memahami realita pelaksanaan suatu kegiatan, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan, kinerja dapat dievaluasi secara menyeluruh sehingga kesalahan dapat segera diatasi dan proses kerja dapat terus ditingkatkan. Manfaat utama dari pengawasan, selain untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana, adalah menjamin agar organisasi berjalan efektif menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, pengawasan berperan penting untuk menjaga kelangsungan arah organisasi sesuai dengan perencanaan, serta mendukung tercapainya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Buku berjudul Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat karya Suaib (2023) mengemukakan bahwa Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat adalah dua konsep yang berbeda pendekatan. Pembangunan bersifat top-down dan fokus pada program pemerintah, sementara pemberdayaan bersifat bottom-up, menekankan partisipasi aktif masyarakat, kemandirian, dan pemanfaatan potensi lokal. Pemberdayaan bertujuan mengalihkan posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta membangun masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian peran institusi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Balikpapan, dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjel-gepeng). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap tiga fungsi utama dinas sosial, yaitu peran perencana (regulatory role), pelaksana (enabling role), dan pengawas (direct role), yang dipadukan dengan data empirik hasil wawancara langsung dengan pejabat dan pelaksana teknis di lapangan.

Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti program secara normatif atau deskriptif, penelitian ini menelaah secara rinci proses penyusunan perencanaan program, pelaksanaan intervensi sosial, serta sistem pengawasan dan evaluasi dampaknya terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, efektivitas pendampingan, dan keberlanjutan pengawasan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kebijakan sosial lokal yang lebih holistik dan adaptif dalam menangani permasalahan anjal-gepeng, serta menjadi referensi empiris dalam studi administrasi publik, kesejahteraan sosial, dan kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjak gepeng) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

II METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini juga digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan subjek (Moleong, 2007). Menurut (Sugiyono, 2019), pendekatan metode kualitatif dalam penelitian adalah suatu pendekatan yang menggunakan landasan filsafat untuk meneliti kondisi ilmiah atau eksperimen. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu maupun kelompok. Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Operasional konsep peran yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori milik Jones (Jones dalam Mahsun, 2006) terbagi atas tiga dimensi yakni Perencana Peran (*Regulatory Role*), Pelaksana Peran (*Enabling Role*), dan Pengawas Peran (*Direct Role*) yang akan menjadi konsep dalam penelitian ini:

1. Perencana Peran (*Regulatory Role*)
Regulasi diperlukan agar masyarakat dapat mengakses dan menggunakan barang serta jasa publik secara adil. Tanpa regulasi dari lembaga pemerintah, dapat terjadi ketimpangan yang merugikan sebagian masyarakat karena tidak memperoleh hak atas layanan publik yang seharusnya tersedia untuk umum.
2. Pelaksana Peran (*Enabling Role*)
Sektor publik berperan memastikan pelaksanaan peraturan dalam penyediaan barang dan jasa publik berjalan efektif. Pemerintah memiliki wewenang untuk menjamin ketersediaan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pengawas Peran (*Direct Role*)
Karena keterbatasan pembiayaan dan kompleksitas tugas, pemerintah dapat melakukan privatisasi. Namun, sektor publik tetap berperan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyediaan barang dan jasa publik agar tidak merugikan masyarakat.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2020) Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman (Sugiyono, 2022) yang meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kota Balikpapan dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Balikpapan yang bertempat di Jalan Ruhui Rahayu I , No.3 Sepinggan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Perencanaan Peran (*Regulatory Role*)

Rencana pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan bagian dari upaya sistematis dan terstruktur dalam menangani permasalahan sosial terkait anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pembinaan dipahami sebagai proses yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, metode, serta sistem tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, yakni peningkatan kualitas hidup kelompok marginal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Dinas Sosial, rencana pembinaan dimulai dari proses penjangkauan langsung ke lapangan, dilanjutkan dengan pendataan, serta pemberian penampungan sementara di rumah singgah. Dalam masa penampungan, para peserta mendapatkan layanan bimbingan sosial, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan wirausaha kecil. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pelatihan dan organisasi sosial mitra guna mendukung keberhasilan reintegrasi peserta ke dalam keluarga atau kehidupan yang lebih mandiri secara ekonomi.

Dalam hal penganggaran, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan prioritas program dan kondisi lapangan. Anggaran pembinaan dialokasikan dari belanja langsung APBD yang mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, termasuk kegiatan lapangan, operasional rumah singgah, konsumsi peserta, perlengkapan pelatihan, honorarium narasumber, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Efektivitas dan efisiensi menjadi tolok ukur penting dalam pemanfaatan anggaran ini. Hal tersebut disusun setiap tahun secara terpadu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aktual, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Sosial.

Adapun target dari rencana pembinaan adalah tercapainya perubahan sosial yang nyata di kalangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial serta Pekerja Sosial, target yang ingin dicapai mencakup berkurangnya jumlah mereka di Kota Balikpapan, serta meningkatnya jumlah peserta yang berhasil direintegrasikan ke dalam keluarga atau mampu hidup mandiri setelah mengikuti program. Target disusun secara kuantitatif dan kualitatif, misalnya partisipasi aktif dalam kegiatan, kembali ke sekolah, atau memulai usaha mandiri. Penetapan target didasarkan pada data jumlah PMKS dan hasil evaluasi program pembinaan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, keseluruhan proses perencanaan ini sejalan dengan konsep perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah proses sistematis dalam menyiapkan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

3.2 Pelaksana Peran (*Enabling Role*)

Pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan proses nyata yang dijalankan secara sistematis untuk mencapai tujuan dari program pembinaan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial, pelaksanaan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penjangkauan lapangan yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, dilanjutkan dengan identifikasi, registrasi, dan asesmen oleh pekerja sosial. Asesmen ini bertujuan menelaah latar belakang permasalahan individu, potensi yang dimiliki, serta kondisi sosial dan keluarga yang melatarbelakanginya. Peserta kemudian ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang mencakup konseling, terapi psikososial, pelatihan

keterampilan, advokasi hukum, serta kegiatan edukatif dan rekreatif. Proses pembinaan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama psikolog, psikiater, pendidik luar sekolah, dan lembaga mitra lainnya.

Pendampingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan, dilakukan secara persuasif dan humanis untuk memulihkan fungsi sosial peserta. Anak-anak diarahkan untuk kembali mengenyam pendidikan, sementara peserta dewasa diikutsertakan dalam pelatihan kerja agar dapat kembali mandiri. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti LSM, tokoh masyarakat, instansi pendidikan, dan lembaga pelatihan. Namun, dalam praktiknya, tantangan tetap muncul seperti rendahnya kepercayaan peserta terhadap lembaga sosial, keinginan untuk tetap hidup bebas di jalan, serta keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas rumah singgah.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Dinas Sosial juga melaksanakan pemantauan secara berkala. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial dengan dukungan dari masyarakat sekitar, LSM, dan tokoh lokal melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal atau lokasi aktivitas peserta. Jika ditemukan peserta yang mengalami kesulitan atau kembali ke jalan, maka dilakukan pendekatan ulang dan pendampingan tambahan. Keterbatasan sumber daya manusia serta kecenderungan peserta menghindari pengawasan menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan ini.

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi program yang dilakukan secara langsung melalui monitoring lapangan maupun evaluasi berkala tiap 1 hingga 3 bulan. Evaluasi ini menilai indikator perubahan perilaku, kemandirian ekonomi, kemampuan berinteraksi sosial, serta kepatuhan terhadap aturan. Jika ditemukan peserta yang belum menunjukkan hasil signifikan, maka dilakukan evaluasi lanjutan, pendampingan intensif, atau modifikasi program seperti pelatihan tambahan atau pendekatan dengan keluarga. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan telah mengikuti tahapan yang telah direncanakan dan menekankan kerja sama multisektor meskipun masih menghadapi tantangan internal. Upaya ini selaras dengan pendapat Wiestra (2014) yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, mencakup kesiapan alat, pelaksana, lokasi, serta waktu pelaksanaan secara terstruktur.

3.3 Pengawas Peran (*Direct Role*)

Pengawasan kegiatan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dilaksanakan secara rutin dan terstruktur oleh para pekerja sosial, yang turun langsung ke lapangan untuk memantau setiap tahapan—mulai dari penjangkauan, pelatihan, hingga pendampingan—agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur. Sistem pengawasan ini bertujuan menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, meski sering menemui kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dan rasa tidak nyaman dari peserta yang merasa terlalu diawasi. Di samping itu, identifikasi dampak dan hasil pembinaan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh yang mengukur perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, keberhasilan reintegrasi sosial, kemandirian ekonomi, serta perbaikan kondisi mental dan fisik peserta. Analisis dampak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi, memanfaatkan data kehadiran, laporan wawancara, dan umpan balik lembaga mitra. Bila ditemukan peserta yang belum menunjukkan hasil positif, pekerja sosial melakukan evaluasi lanjutan dan penyesuaian intervensi—misalnya pendampingan intensif atau pelatihan tambahan—untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh manfaat maksimal dari program. Secara keseluruhan, pengawasan dan identifikasi dampak menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan pembinaan sosial, sejalan dengan prinsip pengendalian kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Siangian (2007).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis telah berjalan dengan baik melalui beberapa tahapan, seperti penjangkauan di jalanan, identifikasi dan registrasi, asesmen mendalam terhadap kondisi sosial, potensi, serta lingkungan keluarga, hingga proses pendampingan oleh pekerja sosial dan pemberian layanan rehabilitasi, advokasi, pengasuhan, kesehatan, serta pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial.

Sama halnya dengan temuan penelitian Andi Wahyudi, Jaelan Usman, dan Ansyari Mone (2021) di Kota Makassar, yang juga menunjukkan bahwa proses pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan melalui tahapan identifikasi, asesmen, dan rehabilitasi, termasuk kerja sama dengan lembaga eksternal seperti YKP2N. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa di Kota Balikpapan, pembinaan lebih terintegrasi secara internal dalam lingkup Dinas Sosial, khususnya melalui keberadaan Rumah Perlindungan Sosial yang memiliki pelayanan harian secara menyeluruh.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Veronica Sri Astuti N, Eko Yudianto Y, dan Feri Apriliansah (2023) yang menyebutkan bahwa ketersediaan rumah singgah menjadi faktor penting dalam proses pembinaan gepeng, seperti yang juga diterapkan di Balikpapan. Namun, berbeda dari Kota Probolinggo yang masih mengalami kendala kapasitas shelter, di Kota Balikpapan pembinaan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh tim petugas sosial yang berdedikasi, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan ketersediaan sarana yang optimal.

Sama halnya dengan temuan Dian Tannia Rachman (2023) di Surabaya, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan pendidikan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Namun, berbeda dengan temuan Dian, penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan di Rumah Perlindungan Sosial lebih terfokus pada pelayanan rekreatif-edukatif serta dukungan pendampingan spiritual dan sosial secara menyeluruh.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Yanuar Ahmad Abdullah (2021) di Kota Samarinda, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan ditentukan oleh kerja sama antarinstansi seperti Satpol PP, serta peran petugas sosial di lapangan. Namun demikian, temuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih mendalam pada aspek pasca-penjangkauan, yakni dalam hal pelayanan rehabilitasi dan advokasi secara sistemik di dalam institusi sosial, tidak hanya pada aspek razia dan penertiban.

Sementara itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Djaafar dkk. (2022) di Kota Gorontalo, yang menekankan pentingnya pembinaan mental dan pemberdayaan ekonomi kepada pengemis. Hal ini juga ditemukan dalam konteks Balikpapan, meskipun pendekatannya lebih luas dan mencakup dimensi fisik, spiritual, sosial, dan edukatif yang diberikan secara simultan di Rumah Perlindungan Sosial.

Dengan demikian, *temuan dalam penelitian ini memperkuat dan melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya, sekaligus menunjukkan bahwa pola pembinaan di Kota Balikpapan memiliki karakteristik yang cukup komprehensif dan terintegrasi, yang dapat menjadi model rujukan bagi daerah lain dalam menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis secara berkelanjutan.*

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah adanya pendekatan yang holistik dan humanis dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Balikpapan, di mana tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh sisi psikososial melalui konseling, terapi, serta kegiatan edukatif dan spiritual. Selain itu, keterlibatan multipihak seperti LSM, tokoh masyarakat, dan lembaga pelatihan menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang cukup kuat dalam mendukung keberhasilan program. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan permasalahan

sosial tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik individu serta dinamika sosial masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Balikpapan melaksanakan peran strategis dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui pendekatan yang menyeluruh, meliputi fungsi sebagai perencana (*regulatory role*), pelaksana (*enabling role*), dan pengawas (*direct role*). Dalam peran perencana, Dinas Sosial menyusun program secara sistematis mulai dari penjangkauan hingga pelatihan keterampilan, dengan dukungan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan aktual dan prioritas program. Sebagai pelaksana, Dinas Sosial menjalankan program dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga mitra untuk memberikan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial secara terpadu. Namun, pelaksanaan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta resistensi dari peserta. Dalam hal pengawasan, pekerja sosial aktif melakukan pemantauan dan evaluasi dampak program guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap peserta mengalami peningkatan dari segi sosial, psikologis, dan ekonomi. Ketiga peran ini saling terintegrasi dan berjalan selaras dengan teori-teori kebijakan sosial, menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sosial menuntut perencanaan yang matang, pelaksanaan yang kolaboratif, dan pengawasan yang ketat serta berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian, Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Balikpapan.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*), Peneliti menyadari bahwa keterbatasan partisipasi responden menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat melibatkan peserta program binaan secara langsung agar efektivitas dan tantangan pembinaan dapat dikaji dari perspektif penerima manfaat. Selain itu, kajian lanjutan dapat memperdalam aspek kolaborasi lintas sektor, seperti keterlibatan dunia usaha, sekolah, dan tokoh masyarakat, serta menganalisis dampak jangka panjang program secara lebih mendalam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi, serta pengembangan model pembinaan berbasis komunitas juga dapat menjadi fokus penting dalam penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anakjalanan Di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 78–91. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal Yanuar \(02-14-21-10-34-11\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal_Yanuar_(02-14-21-10-34-11).pdf)
- Almaida, A., Eka Putri O. A., A., Zulkifli, Z., Ridwan Said Ahmad, M., & Arifin, I. (2023). Fenomena Anak Jalanan di Kota Makassar dan Problematika yang Dihadapi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian*

- Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 3131–3138. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.721>
- Caesar, M. R., & LISTANIA, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Neo Politea*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i2.104>
- Destiani, D. A., Nastia, & Basir, M. A. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), 555–564. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2708%0Ahttps://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/2708/2176>
- Djaafar, L., Wantu, S., Lukum, R., & Hamid, S. Al. (2022). Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1553. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1101>
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya
- N, V. S. A., Y, E. Y., & Apriiliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3991>
- Nagaring, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 105–119.
- Nurrahman, A. (2020). Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2314>
- Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>
- Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–11. <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/3020%0Ahttp://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/download/3020/1795>
- Purwoko, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak eJournal Sosiologi. *EJurnal Sosiologi*, 1(4), 13–25.
- Rachma, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*, 662–672.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.247>
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Suaib, 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu : Penerbit Adab
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- , 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sururama, R. dan R. Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung : Cendekia Press
- Syamsurya. (2022). *Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda*. 1–23.

- Tambawang, L., Sofyan, A., Susilawaty, S., Juli, L., & Fatimah, S. (2023). Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 322–327. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.996>
- Wahyudi, A., Usman, J., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal.Unismuh*, 2(4), 1287–1299. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

